

**DINAMIKA TRANSPARANSI
DAN BUDAYA BADAN PUBLIK PASCA REFORMASI BIROKRASI
(STUDI KASUS TENTANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE BADAN PUBLIK SE-
INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KUALITASNYA SEBAGAI BADAN PUBLIK PERSPEKTIF
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NO.14/2008 DI PROPINSI JABAR DAN KALBAR)**

Oleh : ¹Atie Rachmiate, ² Dadi Ahmadi ³ Ema Khotimah
Email : ¹ atierachmiate@yahoo.com, ² dadi.ahmadi@gmail.com ³ emakho_ruchaemi@yahoo.com

ABSTRAK. Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan *good governance* dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undang-undang. Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesia dalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no.14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “*mindset*” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “*good and clean governance*” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “*hidden resistency*” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.

Kata kunci : Keterbukaan informasi publik, Transparansi, reformasi birokrasi

**DYNAMICS OF TRANSPARENCY
AND CULTURAL AGENCY REFORM AFTER PUBLIC BUREAUCRACY
(CASE STUDY ON GOOD GOVERNANCE AND CLEAN AGENCY PUBLIC GOVERNANCE
IN INDONESIA IN IMPROVING QUALITY AS A PUBLIC AGENCY PERSPECTIVE PUBLIC
INFORMATION DISCLOSURE Law No.14 / 2008 IN THE PROVINCE Jabar AND KALBAR)**

ABSTRACT. *The disclosure of information under the Act 14/2008 has become the momentum to realize good governance and encourage the democratic system of governance in Indonesia. The im-plication is the public has given the access and rights to public information, which is a part human rights, and with the guarantee of the law. In addition, public information disclosure should encourage the participation of the community to participate in “coloring” government policies by “pro-public”. Local government is no exception to the obligation to provide information to the public who wish to access any kind of information as regulated by law. However, based on the report of the Ombudsman Republic of Indonesia, local government has the highest rank as an institution with a great deal of complaints from the public on services rendered. The problem is: “How the Cultural Dynamics and Transparency of Public Agency in Indonesia Improving Their Quality as Public Agency in the Perspective of Act Num.14 / 2008 on Public Information Disclosure? This research was done using case studies methods, through in-depth interviews and focus group discussions, to the PR officials, PPID, the Information Committee in West Java and West Kalimantan province. The study results shows that transparency in the context of public information disclosure in public bodies of local government, has been formally meet the readiness of the institution, infrastructure and human resources, but still constrained by the post-reformation mindset of bureaucracy which has yet be changed. The spirit and philosophy of good and clean gover-nance itself, is generally not facing considerable opposition in the practical level, but there are hidden resistency in the officials, thus made public information services not optimal.*

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, telah terjadi banyak perubahan penting di berbagai bidang kehidupan masyarakat, juga telah dimulainya era reformasi gelombang pertama. Perubahan ini dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang

dalam pembukaan UUD tahun 1945. Momentum ini juga telah menjadi awal dimulainya proses reformasi di semua bidang secara menyeluruh menuju pemerintahan yang profesional dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) aspek integral bidang struktural, instrumental dan kultural.

Perkembangan reformasi di bidang birokrasi sendiri masih tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Sehingga pada tahun